

## ABSTRAK

**Diar Abdul Aziz, Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 417/Pid.B/2023/PN Blb Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Dihubungkan Dengan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016.**

Penelitian ini dilatar belakangi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 417/Pid.B/2023/PN Blb dimana para pelaku melakukan tindak pidana perjudian online online yang diatur dalam UU ITE dimana terdakwa I KIKI RAMDANI BIN BUDI SURATMAN dan Terdakwa II WAWAN SETIAWAN BIN ALIT, mengadakan judi online togel dengan alasan ingin memperoleh keuntungan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, diselenggarakan oleh Terdakwa I dengan cara setiap pemain akan diharuskan memberikan uang sebanyak Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I yang kemudian bertindak sebagai bandar dan akan menampung beberapa pemain sampai kurang lebih terpenuhi kuota 8 (delapan) orang, setelah memenuhi kuota 8 (dalapan) pemain, pemain-pemain tersebut dipersilahkan oleh Terdakwa I untuk memasang nomor sebanyak 2 (dua) atau 4 (empat) digit angka kemudian uang dan pasangan tersebut dicatat oleh Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa I memasukkan nomor tersebut ke dalam akun milik Terdakwa I bernama "SUPER4DTOTO", tetapi majelis hakim memutuskan bahwa para terdakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur perjudian biasa sehingga tidak sesuai dengan asas *Asas lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum, bagaimana pertimbangan hakim, dan bagaimana analisis Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 417/Pid.B/2023/PN Blb.

Metode penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis*, metode penelitian ini menggambarkan dan menganalisis fenomena hukum secara sistematis dan mendalam. Melalui pendekatan studi kasus (*case study approach*), Metode pengumpulan data yang digunakan di sini, ialah menggunakan kepustakaan (*Library Research*), kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa *pertama* penerapan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim tidak tepat, *kedua* hakim mempertimbangkan dalam memutus putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Blb dikarenakan tindakan yang dilakukan para terdakwa sudah sesuai dengan unsur – unsur yang terdapat pada Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, *ketiga* Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana judi online dalam putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Blb masih menerapkan ketentuan hukum dan sanksi pidana yang bersifat generalis atau bersifat umum yang hanya berdasarkan pada peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja dan tidak menerapkan peraturan yang bersifat lebih khusus, meskipun dengan menggunakan KUHP juga dapat diterapkan dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana judi online, namun KUHP masih bersifat generalis atau belum mengatur kasus judi online secara mendetail sehingga penerapan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP membuat adanya ketidak pastia hukum dalam putusan no. 417/Pid.B/2023/PN blb.